



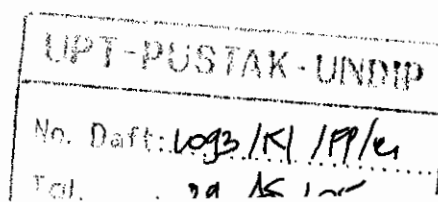
LAPORAN AKHIR

**EVALUASI DAN ANALISIS
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DI JAWA TENGAH**

TIM PENELITI :

**SUDIYONO MARZUKI
TANDYO PRADEKSO
A TAUFIQ**

**PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
LEBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**



KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, maka Buku Laporan Akhir "Evaluasi Dan Analisis Keberhasilan Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah" berhasil diselesaikan. Penyusunan Buku Draft Final ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Pusat Penelitian Kependudukan dan Kebijakan Publik Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang.

Buku Laporan Akhir "Evaluasi Dan Analisis Keberhasilan Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah" ini terdiri dari bab satu pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, sasaran, manfaat dan kegunaan, ruang lingkup, metode penelitian. Bab dua berisi konsep dan kerangka pikir IPM dan IKM, dan pengukuran IPM dan IKM. Bab tiga berisi kondisi kependudukan, pendidikan, kesehatan, perumahan, data penduduk miskin dan pengeluaran rumah tangga. Bab empat berisi indeks kemiskinan manusia, indeks pembangunan manusia dan pembahasan & umpan balik IPM dan IKM. Bab lima berisi evaluasi penanggulangan kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan dan pembahasan indikator kemiskinan. Dan diakhiri dengan bab enam yang berisi kesimpulan dan saran.

Kami berharap agar Buku Laporan Akhir "Evaluasi Dan Analisis Keberhasilan Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah" ini dapat berguna sebagai bahan acuan dan dasar dalam perencanaan pembangunan dan pembuatan kebijakan baik pada tingkat pemerintah kabupaten/kota dan tingkat Propinsi Jawa Tengah.

Semarang, Juli 2003

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Grafik.....	v
Daftar Gambar.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Tujuan.....	I - 4
1.3. Sasaran	I - 4
1.4. Manfaat dan Kegunaan.....	I - 4
1.5. Ruang Lingkup.....	I - 4
1.6. Metode Penelitian.....	I - 5
1.6.1. Lokasi Penelitian.....	I - 5
1.6.2. Metode Analisis.....	I - 5
1.6.3. Asumsi-asumsi Dalam Perhitungan IPM dan IKM...	I - 7
BAB II KONSEP DAN INDIKATOR IPM DAN IKM	II -1
2.1. Konsep dan Kerangka Pikir IPM dan IKM.....	II -1
2.2. Pengukuran IPM dan IKM	II -4
BAB III GAMBARAN UMUM.....	III - 1
3.1. Kondisi Kependudukan.....	III - 1
3.2. Kondisi Pendidikan.....	III - 8
3.3. Kondisi Kesehatan.....	III -12
3.4. Kondisi Perumahan	III -28
3.5. Penduduk Miskin	III -33
3.6. Pengeluaran Rumah Tangga	III -35
BAB IV INDEKS KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	IV - 1
4.1. Indeks Kemiskinan Manusia.....	IV - 2
4.2. Indeks Pembangunan Manusia.....	IV- 28
4.3. Pembahasan & Umpan Balik IPM dan IKM	IV- 50
BAB V MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH.....	V - 1
5.1. Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah	V - 1
5.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah	V - 9
5.3. Pembahasan Indikator Kemiskinan.....	V-15
BAB VI PENUTUP.....	VI -1
6.1 Kesimpulan.....	VI -1
6.2.Rekomendasi.....	VI -3
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.2.1	Kesamaan Komponen dan Perbedaan Pengukuran IPM dan IKM	II - 5
Tabel 2.2.2	Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap Komponen IPM	II - 6
Tabel 2.2.3	Tahun Konversi dari Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	II - 7
Tabel 2.2.4	Contoh Perhitungan IPM, Diambil dari Data Propinsi Jawa Tengah Tahun 1999	II - 7
Tabel 2.2.5	Contoh Perhitungan IKM, untuk Propinsi Jawa Tengah Tahun 1999	II - 8
Tabel 3.1.1	Rasio Jenis Kelamin (Sex Rasio) dan Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota, Tahun 1990 dan 2000.....	III - 3
Tabel 3.1.2	Penduduk Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, Persentase Penduduk Perkotaan, Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk per km ² , Tahun 2000.....	III - 5
Tabel 3.1.3	Penduduk Jawa Tengah Menurut Struktur Umur 0-14, 15-64 dan 65+ Tahun dan Kabupaten/Kota, Tahun 2000.....	III - 7
Tabel 3.2.1	Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Propinsi Jawa Tengah Tahun 2000 dan Tahun 2001.....	III - 9
Tabel 3.2.2	Angka Melek Huruf & Rata-rata Lama Sekolah Propinsi Jawa Tengah Tahun 1998 – 2002.....	III - 10
Tabel 3.2.3	Angka Partisipasi Sekolah, Melek Huruf 10 Tahun ke Atas Propinsi Jawa Tengah Tahun 2000.....	III - 11
Tabel 3.3.1	Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Kesehatan di Jawa Tengah, Tahun 2000 (ribu).....	III - 14
Tabel 3.3.2	Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kunjungan ke Fasilitas Kesehatan/Tenaga Kesehatan di Jawa Tengah, Tahun 2000 (ribu).....	III - 18
Tabel 3.3.3	Banyaknya Rumah Sakit, Tempat Tidur, & Rata-rata Tempat Tidur per 10.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2000.....	III - 20
Tabel 3.3.4	Banyaknya Puskesmas, Dokter, Dokter per Puskesmas dan Dokter per 10.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2000.....	III - 23
Tabel 3.3.5	Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Terakhir di Jawa Tengah, Tahun 2000 (ribu).....	III - 25
Tabel 3.3.6	Balita Usia 2 - 4 Tahun menurut Kabupaten/Kota, Lamanya Disusui dan Rata-rata Pemberian Makanan Tambahan di Jawa Tengah, Tahun 2000 (ribu).....	III - 27
Tabel 3.4.1	Persentase Rumah tangga menurut Kualitas Bangunan Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000.....	III - 29
Tabel 3.4.2	Persentase Rumah tangga menurut Utilitas Bangunan Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000.....	III - 32
Tabel 3.5.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 1999 dan Tahun 2002.....	III - 34
Tabel 3.6.1	Pengeluaran Rata-rata per kapita per bulan.....	III - 36
Tabel 3.6.2	Persentase Pengeluaran Rata-rata perkapita per bulan.....	III - 37

Tabel 3.6.3	Pengeluaran Riil Per Kapita Propinsi Jawa Tengah 1998 -2002.....	III - 37
Tabel 4.1.1	Penduduk Yang Diperkirakan Tidak Mencapai Usia 40 Propinsi Jawa Tengah 1998 -2002.....	IV - 4
Tabel 4.1.2	Angka Buta Huruf Penduduk Dewasa Propinsi Jawa Tengah 1998 - 2002.	IV - 8
Tabel 4.1.3	Penduduk Tanpa Akses Pada Air Bersih Propinsi Jawa Tengah 1998-2002.....	IV - 12
Tabel 4.1.4	Penduduk Tanpa Akses Terhadap Sarana Kesehatan Propinsi Jawa Tengah Tahun 1998-2002.....	IV - 16
Tabel 4.1.5	Balita Kurang Gizi Propinsi Jawa Tengah 1998-2002.....	IV - 20
Tabel 4.1.6	Indeks Kemiskinan Manusia Propinsi Jawa Tengah 1998-2002.....	IV - 24
Tabel 4.2.1	Angka Harapan Hidup Propinsi Jawa Tengah 1998 -2002.....	IV - 30
Tabel 4.2.2	Angka Melek Huruf Propinsi Jawa Tengah 1998-2002.....	IV - 34
Tabel 4.2.3	Rata-Rata Lama Sekolah Propinsi Jawa Tengah 1998-2002.....	IV - 38
Tabel 4.2.4	Pengeluaran Riil Per Kapita Propinsi Jawa Tengah 1998-2002.....	IV - 42
Tabel 4.2.5	Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Tengah 1998-2002.....	IV - 46
Tabel 5.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Th. 1999 dan 2002.....	V -16
Tabel 5.2	Rekapitulasi Data Keluarga Miskin Jawa Tengah Th. 2002.....	V -18
Tabel 5.3	Pra S dan KS I – ALEK DAN ALNEK.....	V – 21
Tabel 5.4	Jumlah dan Persentase Keluarga Pra Sejahtera Dan KS I Jawa Tengah...	V - 22
Tabel 5.5	Data Penduduk Miskin Di Jawa Tengah Menurut Bappermas Tahun 2001	V - 23
Tabel 5.6	Variabel Terpilih Yang Digunakan Dalam Penentuan Kriteria Rumah Tangga Miskin.....	V - 26

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 4.1.1 Penduduk Yang Diperkirakan Tidak Mencapai Usia 40 Menurut Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah 1998 - 2002.....	IV - 5
Grafik 4.1.2 Penduduk Yang Diperkirakan Tidak Mencapai Usia 40 Propinsi Jawa Tengah 1998 - 2002.....	IV - 6
Grafik 4.1.3 Angka Buta Huruf Penduduk Dewasa Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah 1998 - 2002.....	IV - 9
Grafik 4.1.4 Angka Buta Huruf Penduduk Dewasa di Propinsi Jawa Tengah 1998 - 2002.....	IV - 10
Grafik 4.1.5 Penduduk Tanpa Akses Pada Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah 1998-2002.....	IV - 13
Grafik 4.1.6 Penduduk Tanpa Akses Pada Air Bersih Propinsi Jawa Tengah 1998-2002.....	IV - 14
Grafik 4.1.7 Penduduk Tanpa Akses Terhadap Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1998-2002.....	IV - 17
Grafik 4.1.8 Penduduk Tanpa Akses Terhadap Sarana Kesehatan Propinsi Jawa Tengah Tahun 1998-2002.....	IV - 18
Grafik 4.1.9 Balita Kurang Gizi Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah 1998-2002.....	IV - 21
Grafik 4.1.10 Balita Kurang Gizi Propinsi Jawa Tengah 1998-2002.....	IV - 22
Grafik 4.1.11 Indeks Kemiskinan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah 1998-2002.....	IV - 25
Grafik 4.1.12 Indeks Kemiskinan Manusia Propinsi Jawa Tengah 1998-2002.....	IV - 26
Grafik 4.1.13 Perbandingan Indeks Kemiskinan Manusia Lima Propinsi di Pulau Jawa 1995 - 2002.....	IV - 27
Grafik 4.2.1 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah 1998 -2002.....	IV - 31
Grafik 4.2.2 Angka Harapan Hidup Propinsi Jawa Tengah 1998 -2002.....	IV - 32
Grafik 4.2.3 Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah 1998-2002.....	IV - 35
Grafik 4.2.4 Angka Melek Huruf Propinsi Jawa Tengah 1998-2002.....	IV - 36
Grafik 4.2.5 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah 1998-2002.....	IV - 39
Grafik 4.2.6 Rata-Rata Lama Sekolah Propinsi Jawa Tengah 1998-2002.....	IV - 40
Grafik 4.2.7 Pengeluaran Riil Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah 1998-2002.....	IV - 43
Grafik 4.2.8 Pengeluaran Riil Per Kapita Propinsi Jawa Tengah 1998-2002.....	IV - 44
Grafik 4.2.9 Indeks Pembangunan Manusia Menurut kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah 1998-2002.....	IV - 47
Grafik 4.2.10 Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Tengah 1998-2002.....	IV - 48
Grafik 4.2.11 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Lima Propinsi di Pulau Jawa 1996-2002.....	IV - 49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1.1 Kerangak Pikir IPM	II - 3
Gambar 2.1.2 Indeks Kemiskinan Manusia	II - 3
Gambar 5.2 Forum Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	V - 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Isu pembangunan manusia akhir-akhir ini telah menjadi isu sentral sejajar dengan isu kemiskinan. Konsep pembangunan manusia itu sendiri memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pertumbuhan, pengembangan sumber daya manusia, dan kebutuhan dasar. Konsep Pembangunan Manusia menuntut terjadinya formasi atas kemampuan dan pemampuan manusia yang terlihat melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan, serta daya beli ; sehingga penduduk memperoleh manfaatnya, terutama dalam hal produktivitas, pemerataan, pemberdayaan dan kesinambungan.

Dinamika kependudukan mempunyai keterkaitan dan saling berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di segala bidang. Kualitas dan kuantitas penduduk akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan. Sebaliknya keberhasilan pembangunan sering diukur dari adanya peningkatan kualitas penduduk. salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan menurunnya indeks kemiskinan (*Poverty Index*).

Pelaksanaan otonomi daerah serta globalisasi pada millenium ketiga menuntut adanya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan pembangunan. Pemanfaatan dan alokasi sumber daya dan dana perlu diupayakan seoptimal mungkin agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan harus diupayakan bersifat "*bottom up planning*" dengan mengetahui potensi dan kendala pembangunan yang terdapat di setiap wilayah. Kendala-kendala dan permasalahan dalam pembangunan di segala bidang kehidupan harus dieliminir untuk menghindari ekonomi biaya tinggi, sebaliknya peluang dan kekuatan yang ada, yang merupakan potensi wilayah perlu dioptimalkan dalam pelaksanaan pembangunan.

Peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan dapat diupayakan dengan menyediakan data-data yang akurat, yang berkaitan antara lain dengan jumlah dan kualitas sasaran (obyek), pelaku (subyek), kondisi sumber daya alam, dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya untuk menilai atau mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan atau program pembangunan diperlukan tersedianya indikator-indikator yang relevan. Berkaitan dengan masalah ini, maka dalam setiap kebijakan dan program haruslah dapat ditentukan sekurang-kurangnya sebuah indikator kuantitatif yang dapat dipakai sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan kebijakan dan program tersebut. Dengan sendirinya indikator ini merupakan indikator tunggal (*univariate*) yang dapat diobservasi dan dapat diukur dengan hasil pengukuran atau observasi yang benar dan dapat dipercaya (*valid & reliabel*). Ketersediaan indikator semacam ini akan mengarah kepada penilaian yang objektif tentang keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dan program.

Pernyataan di atas ini bukanlah berarti bahwa indikator kualitatif tidak diperlukan dan dapat diabaikan. Atas dasar pemikiran bahwa tidak semua permasalahan dapat diukur secara kuantitatif, maka dengan sendirinya data dan informasi kualitatif tetap harus diperhatikan atau tetap diperhitungkan berkaitan dengan setiap kebijakan dan program. Akan tetapi, jika tidak tersedia sebuah indikator kuantitatif, maka suatu kebijakan dan program itu akan sulit dievaluasi.

Atas dasar pemikiran di atas, maka diperlukan indikator-indikator yang dapat diobservasi dan dapat diukur baik ditingkat propinsi maupun ditingkat wilayah (kabupaten/kota, kecamatan atau desa). Keberadaan indikator ini berguna untuk membandingkan keberhasilan pembangunan di masing-masing wilayah sekaligus untuk mengukur kinerja pemerintahan dalam kegiatan pembangunan.

Pelaksanaan program pembangunan nasional di Indonesia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif mengembangkan kemampuannya dan memanfaatkan hasil pembangunan, namun dalam kenyataannya proses pembangunan belum bisa mengangkat status dan peranan seluruh lapisan masyarakat sebagaimana yang diharapkan.

Jumlah penduduk miskin kian bertambah dengan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kondisi ini sebagai dampak makin bertambahnya jumlah pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat. Keadaan seperti ini bila berlangsung lama akan dapat memicu munculnya kerawanan sosial.

Untuk membantu masyarakat yang tergolong miskin tersebut diperlukan program-program terpadu, tepat sasaran dan berkesinambungan. Pemerintah telah sering melakukan program-program pengentasan kemiskinan seperti Inpres Desa Tertinggal dan Program Penghapusan Kemiskinan melalui program Keluarga Sejahtera. Program-program pengentasan kemiskinan baik jumlah program maupun nilainya (jumlah dananya) selalu meningkat setiap tahun dan pelaksanaannya saling tumpang tindih, tetapi ironinya jumlah penduduk miskin juga meningkat. Ini berarti efektivitas program tidak berjalan dengan baik. Salah satu penyebab dari hal tersebut di atas adalah kurang akuratnya data tentang kemiskinan dan jumlah penduduk miskin.

Sumber data dan informasi tentang kemiskinan antara lain dapat diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Pemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi. Namun dari ketiga sumber data tersebut informasi tentang keluarga dan penduduk miskin berbeda-beda angkanya. Hal ini disebabkan dasar pendekatan dan analisis data yang dipergunakan berbeda. Data kemiskinan menurut BPS didasarkan pada pendekatan tingkat konsumsi penduduk. Sedangkan BKKBN angka kemiskinan didasarkan pendekatan pada kebutuhan hidup secara fisik dan rohani. Data kemiskinan di Pemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi diperoleh dari registrasi penduduk dengan pendekatan yang berbeda-beda.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan manusia, diperlukan upaya untuk melakukan *review* terhadap berbagai indikator kemiskinan dan penentuan jumlah penduduk miskin yang dapat diterima berbagai pihak di setiap Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.

1.2. TUJUAN

Studi Evaluasi dan Analisis Keberhasilan Pembangunan Manusia di Jawa Tengah bertujuan untuk :

1. Menganalisis data penduduk miskin di tiap Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah.
2. Menganalisis manajemen penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.
3. Menyusun Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) di tiap-tiap Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, selama 5 tahun (tahun 1998 – 2002)
4. Mengevaluasi dan menganalisis Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) di Jawa Tengah
5. Menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tiap-tiap Kabupaten/ Kota se- Jawa Tengah, selama lima tahun (tahun 1998 – 2002)
6. Mengevaluasi dan menganalisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tiap-tiap Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah.

1.3. SASARAN

Sasaran yang diinginkan adalah teridentifikasinya keberhasilan penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan di Propinsi Jawa Tengah yang tercermin dalam angka Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kemiskinan.

1.4. MANFAAT DAN KEGUNAAN

Hasil Studi Evaluasi dan Analisis Keberhasilan Pembangunan Manusia di Jawa Tengah, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para penentu kebijakan dalam perencanaan pembangunan di Jawa Tengah.

1.5. RUANG LINGKUP

Untuk mencapai sasaran materi yang telah ditetapkan di atas, maka ruang lingkup Studi Evaluasi dan Analisis Keberhasilan Pembangunan Manusia di Jawa Tengah, meliputi kegiatan - kegiatan :

1. Mengumpulkan data-data sekunder tentang penduduk dan penduduk miskin di Propinsi Jawa Tengah, baik yang bersumber dari BPS, dan instansi terkait.
2. Melakukan kajian terhadap indikator-indikator kemiskinan dan pembangunan manusia yang ada di Jawa Tengah
3. Melakukan diskusi mendalam dengan instansi terkait di tingkat Propinsi untuk menentukan indikator kemiskinan dan pembangunan manusia.
4. Menyusun Indeks Kemiskinan (HPI) untuk setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, selama kurun waktu lima tahun (tahun 1998 – 2002)
5. Menyusun indeks Pembangunan Manusia (HDI) tiap-tiap Kabupaten/ Kota, di Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (tahun 1998 – 2002)
6. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap HPI dan HDI yang telah disusun.
7. Menyusun manajemen penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Lokasi Penelitian

Studi Evaluasi dan Analisis Keberhasilan Pembangunan Manusia di Jawa Tengah ini dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah.

1.6.2. Metode Analisis

Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Studi ini memerlukan data primer dan data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan berasal dari BPS (terutama Susenas Modul 1999, Sensus Penduduk 2000, Susenas Kor 2000, Susenas Kor 2001, Susenas Modul 2002), Bappermas, BKKBN, Dinas Kesehatan dan Kabupaten / Kota Dalam Angka.

Data-data yang dikumpulkan meliputi data tentang kemiskinan, penduduk miskin, angka harapan hidup, rata-rata tahun sekolah, angka melek huruf, konsumsi per kapita, proporsi penduduk yang memperoleh akses terhadap

pelayanan kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap lembaga ekonomi dan ketenaga kerjaan.

Di samping data sekunder akan dipergunakan pula data primer, yang diperoleh dari hasil diskusi mendalam dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota. Diharapkan dari diskusi mendalam dengan instansi terkait dapat ditemukan indikator kemiskinan dan pembangunan manusia yang diterima berbagai pihak yang berkepentingan dengan pembangunan manusia.

Dalam analisis Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sumber data dari BPS Pusat untuk tahun 1999 dan tahun 2002 dan BPS Jawa Tengah untuk tahun 1998, 2000, dan tahun 2001, dengan sumber data KOR Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Propinsi Jawa Tengah dan Data Modul Konsumsi Survei Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Jawa Tengah. Perhitungan untuk tahun 1999 dan 2002 menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi yang diselenggarakan BPS. Perhitungan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) tahun 1998, 2000 dan 2001 dihitung berdasarkan Ekstrapolasi (Intrapolasi) data tahun 1999 dan 2002.

Penyusunan Indeks Kemiskinan di masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dilakukan perhitungan dengan mendasar pada perhitungan indeks kemiskinan manusia (IKM) yang telah dilakukan oleh UNDP, Bappenas dan BPS. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)} = [1/3 (A^3 + B^3 + C^3)]^{1/3}$$

Dimana variabel-variabel untuk menghitung indeks kemiskinan manusia (IKM) adalah :

1. Kemungkinan tidak bertahan hidup hingga umur 40 tahun (A).
2. Angka Buta Huruf (B).
3. Indeks Kesehatan Penduduk (C) dengan indikator :
 - Proporsi penduduk yang tidak mendapat pelayanan air bersih (X)
 - Proporsi penduduk yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan (Y)

- Proporsi Balita yang berstatus gizi rendah (Z)

$$\text{Rumus Indeks Kesehatan Penduduk (C)} = 1/3 (X + Y + Z)$$

Untuk menyusun IPM, digunakan rumus , sebagai berikut :

$$\text{Rumus Indeks Pembangunan Manusia (IPM)} = 1/3 (IK + IP + IDB)$$

Dimana :

- IK : Indeks Kesehatan, dengan indikator harapan hidup penduduk
- IP : Indeks Pendidikan, dengan indikator rata-rata tahun sekolah dan angka melek huruf
- IDB : Indeks daya beli, yang diukur dengan konsumsi rata-rata per kapita

1.6.3. Asumsi-Asumsi Dalam Perhitungan IPM dan IKM

- a) Perhitungan untuk Tahun 1999 dan 2002 menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi BPS.
- b) Perhitungan untuk Tahun 1998, 2000 dan Tahun 2001 menggunakan data KOR Survei Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.
- c) Ada perbedaan kecenderungan antara Data KOR Susenas dengan Data Modul Konsumsi Susenas, yakni bahwa ada kecenderungan *Underestimate* pada data KOR Susenas.
- d) Data terakhir BPS (1999) merupakan revisi data tahun 1999 yang telah dipublikasikan sebelumnya dalam laporan "Menuju Konsensus Baru" (kerjasama BPS, Bappenas dan UNDP) versi Bahasa Indonesia, sedangkan versi Bahasa Inggris berjudul : "***Toward A New Consensus***"
- e) Perhitungan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Tahun 1998, 2000 dan 2001 dihitung berdasarkan Ekstrapolasi (Intrapolasi) data Tahun 1999 dan 2002.
- f) Jumlah sampel Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi Propinsi Jawa Tengah berjumlah 7.552 Rumah Tangga (472 blok x 16 Rumah Tangga).

- g) Jumlah sampel Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR Propinsi Jawa Tengah berjumlah 25.248 Rumah Tangga (1578 blok x 16 Rumah Tangga).
- h) Untuk nilai minimum data Daya Beli (Income Index) atau yang dikenal dengan **Purchasing Power Parity** (PPP) sejak tahun 1999 disesuaikan dari Rp 300.000 menjadi Rp 360.000. Penyesuaian ini dilakukan karena krisis ekonomi telah menyebabkan penurunan daya beli masyarakat secara drastis sebagaimana terlihat dari peningkatan angka kemiskinan dan penurunan upah riil. Penambahan sebesar Rp 60.000 didasarkan pada perbedaan antara "garis kemiskinan lama" dan "garis kemiskinan baru" yang jumlahnya Rp 5.000 per bulan (menjadi Rp 60.000 per tahun).